

**Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur  
Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di  
Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda**

**Rio Sholihin<sup>1</sup>, Nur Fitriyah<sup>2</sup>, Sutadji M<sup>3</sup>**

**Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis proses dan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Dari hasil temuan pada objek penelitian yaitu Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terlihat dalam keikutsertaan di partai politik untuk terlibat menjadi anggota partai politik hanya sebesar 31,82%, hal ini menandakan masih sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam partai politik., Partisipasi selanjutnya berkaitan dengan keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, dengan data yang ada memperlihatkan bahwa hanya sebesar 34,1% masyarakat ikut kegiatan tersebut. Partisipasi penggunaan hak pilih juga sama, menunjukkan angka yang rendah dan mengalami penurunan, pemilihan kepala daerah sebesar 52,27% masyarakat yang datang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi dapat disimpulkan bahwa Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang masih cukup rendah.*

***Kata Kunci: Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur***

**Pendahuluan**

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.

Namun proses rekrutmen ini tidak kondusif terhadap proses politik yang demokratis di daerah, justru semakin buruk, terutama dengan praktek money politic (politik uang) dalam proses pemilihan, maupun dilihat dari

<sup>1</sup> Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

<sup>3</sup> Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

kualitas dan kapabilitas Kepala Daerah terpilih. Salah satu indikator matangnya demokrasi suatu bangsa adalah tingginya tingkat partisipasi politik masyarakatnya. Dalam konteks ini, partisipasi yang diinginkan adalah proses transformasi kepentingan *public* dalam ranah struktur politik, dipilih dan memilih sesungguhnya merupakan posisi yang sama, yakni berpartisipasi dalam dunia politik. Ketika masyarakat aktif dalam dunia/ranah politik, mereka mengatakan bahwa inilah bagian partisipasi dalam (*system*) politik. Namun pada umumnya, partisipasi politik masih dimaknai pendek oleh masyarakat, yakni partisipasi atau keikutsertaan warga Negara (masyarakat) dalam kegiatan memilih baik itu mencoblos atau mencontreng di TPS (tempat pemungutan suara) waktu pemilihan.

Sistem Pemilu Kepala Daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, floating mass (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya.

Sementara itu trend partisipasi pemilih dalam Pemilu cenderung mengalami penurunan, yang berarti tingkat Golput mengalami peningkatan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, dalam tataran regional jika dibandingkan dengan tataran nasional, tingkat golput di masyarakat lebih tinggi lagi. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari angka golput mencapai 44,19 persen, banyak alasan dan faktor yang menyebabkan rendahnya dan penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada tersebut.

Bedasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, agar dapat diketahui secara jelas mengenai fenomena yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang pada pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Partisipasi***

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga Negara dalam proses politik. Keikutsertaan warga Negara dalam politik tidak hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinannya, melainkan juga ikut memilih dalam penentuan pimpinannya (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum) dan masih banyak lagi. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia menerangkan bahwa partisipasi adalah ikut serta dalam suatu kegiatan, kegiatan itu bisa bersifat formal maupun informal.

Menurut UNDP dalam Haris (2007) Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah), LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi yang dilakukan warga Negara tidak hanya pada tahapan implementasi/pelaksanaan, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan/formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

Rahardjo *dalam* Mardijono (2008) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat simobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain.

Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, yaitu :

1. Ada rasa sukarela (tanpa paksaan)
2. Ada keterlibatan secara emosional
3. Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Dengan berpedoman pada pendapat Daves dalam Ndraha (2002) bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri partisipasi, yaitu :

1. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
2. Kesiediaan untuk memberi kontribusi tujuan. Wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, jasa, uang dan sebagainya. Bahkan buah pikiran dan keterampilan.
3. Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga dapat menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ide, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok.

### ***Partisipasi Politik***

Pada abad 14 hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa renaissance dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kota, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara. Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas'ood, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.

1. Modernisasi

Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum profesional) melakukan komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa, mereka merasa dapat mempengaruhi nasib mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

2. Pengaruh-pengaruh struktur kelas sosial

Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada masyarakat untuk membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik

Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar "hak-hak" ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah

menjadi semakin menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Istilah partisipasi seringkali digunakan untuk memberi kesan mengambil bagian dalam sebuah aktivitas. Mengambil bagian dalam sebuah aktivitas dapat mengandung pengertian ikut serta tanpa ikut menentukan bagaimana pelaksanaan aktivitas tersebut tetapi dapat juga berarti ikut serta dalam menentukan jalannya aktivitas tersebut, dalam artian ikut menentukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas tersebut.

Konsep partisipasi politik, menurut Budiardjo (2008) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* dan sebagainya.

Pandangan Huntington dan Nelson dalam Budiardjo (2008) memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir maupun spontan, mantap atau sporadis, secara damai maupun dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Surbakti (2007) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Hal yang menyangkut konseptualisasi tentang partisipasi politik. konseptualisasi merupakan upaya menyusun rambu-rambu sebagai kriteria untuk menentukan apakah suatu fakta termasuk atau tidak termasuk kedalam konsep itu. Berikut ini merupakan rambu-rambu partisipasi politik, pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Sedangkan Closky dalam Budiardjo (2008) mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Hal yang dilerpang terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authoritative allocation of values for a society*).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Data primer berasal dari kuisioner dan wawancara, dengan masyarakat yang memiliki hak pilih pada saat pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur Kaltim 2008-2013 dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan diambil sampel secara *random sampling*, serta pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki pihak kantor Kecamatan. Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diolah dengan menggunakan analisis data model interaktif. (Milles dan Huberman, 2002)

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Partisipasi Politik***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda masih tergolong rendah terutama dalam untuk terlibat dalam partai politik dan ikut serta dalam kampanye, dalam hal penggunaan hak pilih juga sama partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Analisa pertama yang dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan masyarakat tidak terlalu berpengaruh terhadap tindakan atau kegiatan masyarakat untuk terlibat menjadi anggota partai politik. Ada yang hanya berlatar belakang SMP malahan suka berpolitik dan yang berlatar belakang pendidikan lebih tinggi jarang aktif dibidang politik. Namun hal tersebut bisa terjadi jika masyarakat yang berpendidikan tinggi itu sibuk dengan kegiatan yang lebih menjanjikan daripada ikut partai politik. Contohnya saja ada kegiatan politik yang berpotensi besar bagi kehidupannya. Tidak jarang masyarakat yang berlatar belakang tinggi lebih bersikap pasif dan sifatnya hanya lebih banyak mengkritisi keadaan politik yang ada, mereka tidak tertarik untuk ikut partai politik dan sebagainya. Kemudian analisa kedua yang diperoleh adalah masyarakat Kecamatan Sungai Pinang yang terlibat kampanye didominasi oleh lulusan SMA dan Strata 1, kemudian disusul SMP lalu > Sarjana Starata 1. Jika melihat keadaan demikian maka faktor pendidikan cukup berpengaruh dalam keterlibatan masyarakat ikut kegiatan kampanye. Namun pada dasarnya pendidikan masyarakat juga tidak berpengaruh besar terhadap keterlibatan masyarakat mengikuti kegiatan kampanye. Hal itu terjadi karena ada beberapa factor yang mendasari terutama adalah mengenai waktu dari penyelenggaraan Kampanye dimana kampanye dilakukan banyak dalam waktu aktif bekerja

dimana pada saat itu masyarakat tidak bisa mengikuti kampanye karena terbentur dengan waktu bekerja. Selanjutnya analisa terakhir mengenai faktor pendidikan adalah bahwa pendidikan seseorang tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, rata-rata hampir keseluruhan warga masyarakat Kecamatan Sungai Pinang yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) merupakan masyarakat yang sadar dan ingin menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan yang dilaksanakan baik itu calon legislative, kepala daerah maupun presiden.

Kemudian faktor yang berhubungan dengan kesadaran politik, analisisnya adalah kesadaran politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang untuk terlibat menjadi anggota partai politik cukup tinggi, hal demikian didukung dengan dasar banyak masyarakat yang terlibat partai politik atas dasar keinginan sendiri atau tanpa paksaan dan rayuan dari pihak manapun. Begitu pula dengan keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan kampanye, banyak masyarakat ikut kegiatan kampanye karena kesadaran mereka bukan paksaan atau pengaruh-pengaruh tertentu. Selanjutnya analisa dapat diambil adalah kesadaran politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang cukup tinggi untuk menggunakan hak pilihnya, mereka datang ke TPS (tempat pemungutan suara) tanpa adanya paksaan petugas, tanpa adanya janji-janji dari yang bertanding dalam pemilihan itu dan tidak ada hubungan kerabat maupun keluarga. Kesimpulannya adalah semakin baik dan tinggi kesadaran politik masyarakat maka akan semakin tinggi pula partisipasi mereka dalam politik khususnya pada saat pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) atau penggunaan hak pilih.

Faktor status sosial yang menitikberatkan pada pekerjaan memperlihatkan pengaruhnya pada keterlibatan dalam partai politik dan kegiatan kampanye, artinya keadaan dan kondisi pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda dapat membedakan sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam kedua kegiatan itu. Dapat dianalisis bahwa keadaan yang menyebabkan para wiraswasta banyak terlibat dalam kegiatan kampanye dikarenakan mereka tidak terlalu terikat dengan pekerjaan mereka, sehingga diwaktu-waktu luang mereka dapat menyempatkan dirinya untuk terlibat dalam kegiatan kampanye. Sedangkan para petani maupun tenaga pengajar tidak punya waktu untuk terlibat/partisipasi kegiatan tersebut. Sedangkan dalam kegiatan pencoblosan/penggunaan hak pilih, status sosial (pekerjaan) tidak mempengaruhi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dengan catatan pada hari pemilihan mereka tidak sibuk dengan kegiatan yang tidak bisa ditunda/ditinggalkan.

Analisa terakhir mengenai faktor kedekatan emosional menyatakan bahwa kedekatan emosional juga terbukti mempengaruhi masyarakat untuk aktif dalam proses politik seperti terlibat partai politik dan kegiatan kampanye, walaupun tidak terlalu kuat/besar. Sedangkan dalam kegiatan pemilihan (penggunaan hak pilih), hal ini memperlihatkan bahwa kondisi atau yang lebih baik dikatakan dengan kesadaran politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sangat baik, terbukti dengan hampir 100%

mereka datang ketempat pemungutan suara (TPS) tanpa adanya hubungan kerabat/keluarga dan paksaan maupun janji-janji dari seseorang ataupun kelompok-kelompok tertentu.

### ***Partisipasi Politik Masyarakat Menjadi Anggota Partai Politik***

Perjalanan demokrasi di Negeri ini sedikit banyak berdampak pada kegiatan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Salah satu akibatnya banyak bermunculan dan lahirnya wadah-wadah politik yang lebih kita kenal dengan sebutan partai politik. Keberadaan partai politik dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan sampai ke pelosok-pelosok desa/kelurahan sedikit banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Ada sebahagian masyarakat yang merasa ingin tahu dan penasaran sehingga mereka ikut terlibat dalam partai politik, baik itu menjadi anggota biasa/simpatisan maupun pengurus partai politik. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sungai Pinang ikut terlibat menjadi anggota partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat menjadi anggota partai politik hanya sebesar 31,82%, dari 44 responden yang diambil datanya hanya sebanyak 14 orang yang terlibat menjadi anggota partai politik. Sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dalam partai politik sebesar 68,18%, sebanyak 30 orang dari 44 responden menyatakan tidak ikut terlibat dalam partai politik. Alasan masyarakat beragam untuk tidak ikut bergabung dalam partai politik antara lain, memiliki kesibukan bekerja, adapula yang PNS karena terbentur dengan peraturan dan ada pula yang beralasan bahwa politik itu kotor (saling sikut sana-sini dan sering bertengkar merebutkan kekuasaan).

### ***Partisipasi Politik Masyarakat Ikut Kegiatan Kampanye***

Kegiatan kampanye biasanya dilakukan pada masa sebelum waktu pemilihan, hal itu dilakukan agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui siapa-siapa calon yang bertanding dalam pemilihan itu, visi dan misinya atau program-program yang akan dijalankan kedepan selama masa pemerintahannya jika ia terpilih nanti. Kampanye ini terkadang dilakukan ditempat-tempat sarana prasarana umum seperti lapangan dan gelanggang olahraga (GOR), masyarakat yang terlibatpun biasanya cukup besar dan berjumlah banyak. Partisipasi masyarakat Kecamatan Sungai Pinang berikut ini berkaitan dengan adanya kegiatan kampanye baik yang dilakukan partai politik maupun pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye hanya sebesar sebesar 34,1% atau hanya sebanyak 15 orang saja. Sedangkan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan kampanye sebesar 65,9% atau sebanyak 29 orang, masyarakat beralasan tidak mengikuti kegiatan kampanye sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan lainnya, malas dan tidak ada gunanya ikut kampanye karena apa yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon pada saat kampanye hanyalah janji-janji politik saja, apabila sudah menduduki jabatan mereka



seakan lupa akan janji-janji pada saat kampanye, disamping itu ada yang beralasan akibat ketidaktahuan akan kegiatan kampanye tersebut dikarenakan waktu untuk kampanye sangat sempit atau mepet disamping itu kurangnya sosialisasi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang waktu kampanye masing-masing pasangan calon, disamping itu pula media sangat mempengaruhi dimana media kurang aktif dalam memberitakan waktu pelaksanaan kampanye karena sebagian besar masyarakat yang ada memiliki beragam kesibukan pekerjaan masing-masing jadi tidak sempat untuk ikut dalam kampanye politik.

### ***Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih***

Kegiatan mencolok di tempat pemungutan suara (TPS) sebenarnya tidak dapat dipaksakan dan diatur oleh orang lain atau siapapun, hanya dari dalam kesadaran diri pribadi yang dapat menggerakkan hati seseorang datang mencoblos ke tempat pemilihan. Hari yang sangat dinantikan dan pastinya mendebarkan bagi para pasangan calon yang bertanding dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), karena hari pencoblosan sudah semestinya akan menghasilkan pemenang dan sang juara dalam ajang pesta demokrasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilih hanya berjumlah 52,27% atau sebanyak 23 orang, sedangkan 21 orang atau sebanyak 47,73% tidak menggunakan hak pilih, masyarakat beralasan tidak menggunakan hak pilih karena alasan sedang bekerja, jauh dari TPS dan alasan yang paling banyak masyarakat beanggapan siapapun yang memenangkan pemilihan gubernur nasib mereka dibawah tetap sama saja, sangat sedikit sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sungai Pinang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terlihat dalam keikutsertaan di partai politik, kegiatan kampanye dan penggunaan hak pilih/pencoblosan di TPS. Uraianannya : a) Partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi anggota partai politik hanya sebesar 31,82%, hal ini menandakan masih sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam partai politik, b) Partisipasi selanjutnya berkaitan dengan keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, dengan data yang ada memperlihatkan bahwa hanya sebesar 34,1% masyarakat ikut kegiatan tersebut, c) Partisipasi penggunaan hak pilih juga sama, menunjukkan angka yang rendah dan mengalami penurunan, pemilihan kepala daerah sebesar 52,27% masyarakat yang datang untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) itu.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pendidikan, kesadaran politik, status sosial (pekerjaan) dan kedekatan emosional. Faktor pendidikan pada dasarnya tidak mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi dalam partai politik, kegiatan kampanye dan penggunaan hak pilih, maksudnya adalah tingkat pendidikan masyarakat sama sekali tidak terlalu mempengaruhi masyarakat dalam bersikap untuk terlibat partai politik, ikut kampanye dan menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya faktor yang satu ini menandakan betapa pentingnya kesadaran politik masyarakat dalam zaman demokrasi, pengaruh kesadaran politik masyarakat sangat jelas terlihat dalam penggunaan hak pilih pada saat pencoblosan. Semakin tinggi tingkat kesadaran politik masyarakat maka akan semakin tinggi pula partisipasinya. Kemudian pengaruh faktor status sosial (pekerjaan) masyarakat terlihat pada keterlibatan dalam kegiatan kampanye dan partai politik, artinya jika masyarakat memiliki status social (pekerjaan) yang tidak terikat aturan maka mereka akan mudah berpartisipasi dalam kegiatan politik.

#### **Saran-saran**

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: pertama, pemerintah pusat maupun daerah memberikan rangsangan ataupun stimulus baik dana, kelembagaan, pelatihan dan sosialisasi tentang partisipasi khususnya dalam bidang politik sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dan malas untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Kedua, perlu adanya kerja sama antar pemerintah baik daerah maupun pusat dengan lembaga-lembaga seperti partai politik untuk melakukan kegiatan - kegiatan yang sifatnya bisa menumbuhkembangkan partisipasi politik masyarakat. Ketiga, pemerintah perlu melakukan pendekatan dan perhatian serius kepada pihak-pihak dan para masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, agar nanti dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan selanjutnya angka partisipasi bisa meningkat. Terakhir, partisipasi yang rendah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) khususnya dalam penggunaan hak pilih, sebaiknya perlu ada aturan tambahan dalam mekanisme pelaksanaan pilkada itu yang berkaitan dengan jumlah minimum partisipasi masyarakat

#### **Daftar Pustaka**

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mas'oeed, Mohtar, dan MacAndrews, Colin. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Miles, Matthew B, dan Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.*